SKRIPSI

FUNGSI PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA BETENUNG KECAMATAN NANGA TAYAP KABUPATEN KETAPANG

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Oleh:

Daniel Trimedia Bima Sakti
NIM. E1032201064

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2026

SKRIPSI

FUNGSI PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA BETENUNG KECAMATAN NANGA TAYAP KABUPATEN KETAPANG

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Oleh :

Daniel Trimedia Bima Sakti
NIM. E1032201064

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2026

HALAMAN PERSETUJUAN

FUNGSI PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA BETENUNG KECAMATAN NANGA TAYAP KABUPATEN KETAPANG

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

Daniel Trimedia Bima Sakti
NIM E1032201064

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing Utama

Dr. H. Mukhlis., M.Si
NIP 196311121993031001

Tanggal : .....

Dosen Pembimbing Pendamping

Bima Sujendra, S.IP, M.Si
NIP 198805072014041002

Tanggal : .....

UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK

HALAMAN PENGESAHAN

FUNGSI PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA BETENUNG KECAMATAN NANGA TAYAP KABUPATEN KETAPANG

Oleh :

Daniel Trimedia Bima Sakti
NIM E1032201064

Dipertahankan di : Pontianak
Pada Hari/Tanggal : Senin, 15 Juni 2026
Waktu : 10:00-11:00 WIB
Tempat : Ruang Seminar & Sidang Fisip Untan

Tim Penguji

Ketua

Dr. H. Mukhlis., M.Si
NIP 196010031986031004

Sekertaris

Bima Sujendra., S,IP., M,Si
NIP 198805072014041002

Penguji Utama

Prof. Dr. Martoyo., M.A
NIP 196010031986031004

Penguji Pendamping

Martinus., S.Sos., M.Si
NIP 197212272006041002

Disahkan Oleh
Dekan Fisip Untan

Dr. Herlan, S.Sos, M.Si
NIP 197205212006041001

ABSTRAK

Daniel Trimedia Bima Sakti (NIM E1032201064). Fungsi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Betenung Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang. **Skripsi, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak, 2026.**

Skripsi ini bertujuan mendeskripsikan peran Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat dari aspek FungsiPemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat yang terdiri dari aspek Enabling, Empowering dan Protecting Di Desa Betenung Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang di Desa Betenung, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang. Dalam penelitian ini menggunakan teori pemberdayaan menurut Fahrudin (2011) (dalam Shafira, 2018), terdapat tiga hal pokok dalam proses pemberdayaan masyarakat, yaitu: 1) *Enabling,* 2) *Emprowing,* dan 3) *Protecting*. Jenis penelitian ini deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini 1) *Enabling,* pemerintah Desa Betenung telah menjalankan fungsi enabling melalui Musrenbang Desa dan penyediaan informasi terbuka, namun partisipasi masyarakat belum merata sehingga perlu peningkatan keterlibatan warga. 2) *Emprowing,* pemerintah desa telah melaksanakan program pemberdayaan melalui pelatihan dan bantuan usaha, namun pelaksanaannya belum optimal karena keterbatasan anggaran serta belum meratanya jangkauan program kepada masyarakat. dan 3) *Protecting*, pemerintah desa telah memberikan perlindungan sosial melalui bantuan kepada masyarakat kurang mampu, namun jumlah bantuan masih terbatas sehingga belum sepenuhnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara maksimal. Saran dalam penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan peran Pemerintah Desa Betenung melalui penguatan partisipasi masyarakat, optimalisasi komunikasi, serta peningkatan program pemberdayaan yang berkelanjutan. Selain itu, perlindungan sosial perlu lebih tepat sasaran. Masyarakat diharapkan aktif terlibat, sedangkan peneliti selanjutnya perlu mengkaji lebih mendalam efektivitas program pemberdayaan dan perlindungan sosial.

Kata Kunci : Fungsi, Pemerintah Desa, Pemberdayaan Masyarakat.

ABSTRACT

Daniel Trimedia Bima Sakti (Student ID: E1032201064). The Role of Village Government in Community Empowerment in Betenung Village at Nanga Tayap District in Ketapang Regency. Undergraduate Thesis of Government Science Study Program in Faculty of Social and Political Sciences at Universitas Tanjungpura, Pontianak, 2026.

This study aims to describe the role of the Village Government in community empowerment based on the functions of village governance in community empowerment, which consist of the dimensions of enabling, empowering, and protecting in Betenung Village, Nanga Tayap District, Ketapang Regency. This study adopted the empowerment theory proposed by Fahrudin (2011) (as cited in Shafira, 2018), which identifies three key dimensions in the process of community empowerment: (1) enabling, (2) empowering, and (3) protecting. This research employed a descriptive design with a qualitative approach. The findings reveal that: (1) Enabling: the Government of Betenung Village has implemented the enabling function through Village Development Planning Meetings (*Musrenbang Desa*) and the provision of open access to information. However, community participation has not been evenly distributed, indicating the need to enhance public involvement. (2) Empowering: the village government has implemented empowerment programs through training initiatives and business assistance. However, implementation has not yet been optimal due to budget constraints and the uneven distribution of program outreach across the community. (3) Protecting: the village government has provided social protection through assistance programs for disadvantaged community members. Nevertheless, the amount of assistance remains limited and has not fully maximized community welfare improvement. This study suggests strengthening the role of the Government of Betenung Village through enhanced community participation, improved communication, and the expansion of sustainable empowerment programs. In addition, social protection measures should be delivered more accurately and effectively to target beneficiaries. Community members are expected to actively participate in empowerment initiatives, while future researchers are encouraged to examine more deeply the effectiveness of empowerment and social protection programs.

Keywords: Function, Village Government, Community Empowerment

RINGKASAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul "Fungsi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Betenung Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang". Masalah dalam penelitian ini Partisipasi masyarakat Desa Betenung dalam program pemberdayaan masih rendah. Minimnya anggaran terkait pemberdayaan masyarakat Desa Betenung. Minimnya peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa Betenung. Fokus dalam penelitian ini Fungsi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat yang terdiri dari aspek *Enabling, Empowering* dan *Protecting* Di Desa Betenung Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang".

Dalam penelitian ini penuli menggunakan teori pemberdayaan menurut Fahrudin (2011) (dalam Shafira, 2018), terdapat tiga hal pokok dalam proses pemberdayaan masyarakat, yaitu: 1) *Enabling,* 2) *Emprowing,* dan 3) *Protecting*. Jenis penelitian ini deksriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dan teknik *snowball sampling.* Para informan di dalam penelitian ini keseluruhan berjumlah 9 (sembilan) orang, yang menggunaakn teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling* yaitu : Kepala Desa Betenung, Sekretaris Desa, Kepala BPD Desa Betenung, Tokoh Masyarakat, dan 6 (enam) Masyarakat Desa Betenung.

Hasil penelitian ini: 1) *Enabling*, pemerintah Desa Betenung telah menjalankan fungsi enabling melalui Musrenbang Desa dan penyediaan informasi terbuka. Partisipasi masyarakat sudah terlihat, namun belum merata. Masih terdapat warga yang kurang aktif dan belum memanfaatkan informasi desa secara optimal sehingga keterlibatan masyarakat perlu terus ditingkatkan secara berkelanjutan. 2)

Empowering, telah dilakukan melalui pelatihan keterampilan dan pemberian bantuan usaha kepada masyarakat. Program ini membantu meningkatkan pengetahuan dan kemampuan ekonomi masyarakat. Namun pelaksanaannya belum optimal karena keterbatasan anggaran dan belum adanya pendampingan berkelanjutan sehingga manfaat program belum dirasakan secara merata. dan 3) *Protecting*, telah dilaksanakan melalui pemberian bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu serta pelaksanaan program sesuai peraturan. Bantuan tersebut membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Namun jumlah bantuan masih terbatas sehingga belum sepenuhnya meningkatkan kesejahteraan dan masih perlu peningkatan program yang berkelanjutan.

Saran dalam penelitian ini Pemerintah Desa Betenung meningkatkan upaya pemberdayaan masyarakat melalui penguatan partisipasi dalam Musrenbang Desa, penyampaian informasi yang lebih efektif, serta pengembangan program pelatihan yang berkelanjutan dan tepat sasaran. Pemerintah desa juga perlu meningkatkan alokasi anggaran dan melakukan pendampingan secara intensif agar hasil program lebih optimal. Selain itu, perlindungan sosial perlu ditingkatkan baik dari segi ketepatan sasaran maupun jumlah bantuan. Masyarakat diharapkan lebih aktif berpartisipasi dan memanfaatkan program secara produktif. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih mendalam terkait efektivitas program, faktor penghambat, serta inovasi pemberdayaan yang berkelanjutan.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa	:	Daniel Trimedia Bima Sakti
Nomor Mahasiswa	:	*E1032201064*
Program Studi	:	Ilmu Pemerintahan
Fakultas	:	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis adalah hasil karya asli saya sendiri, bukan hasil karya orang lain dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di program studi, fakultas, atau perguruan tinggi lain. Selama pengetahuan saya, skripsi ini tidak memuat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh pihak lain, kecuali yang secara jelas dirujuk dalam Daftar Pustaka di skripsi ini.

Pontianak, 15 Juni 2026
Saya membuat pernyataan



Daniel Trimedia Bima Sakti
NIM E1032201064

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Selesaikan apa yang telah dimulai, meski lelah, jangan menyerah.”

“Jangan berhenti saat lelah, berhentilah saat selesai.”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini di persembahkan untuk :

1. Ayahanda Bosran dan Ibunda Magdalena Ana, yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta pengorbanan tanpa henti demi keberhasilan dan masa depan penulis.
2. Kakak dan Abang tercinta, Beatrix Arianty Sisilia dan Dony Sianturi, atas dukungan, semangat, dan kepercayaan yang selalu diberikan hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
3. Gelvasia Chery Anggita, yang senantiasa menjadi penyemangat, teman diskusi yang sabar, serta selalu membersamai penulis dengan kasih sayang dan pengertian hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Fungsi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Betenung Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang".

Penulis menyusun skripsi ini sebagai tugas akhir dan sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana di Universitas Tanjungpura Pontianak. Penulis menyadari bahwa terdapat berbagai kekurangan dalam skripsi ini, namun hal tersebut menjadi bagian dari proses pembelajaran. Bagi penulis, skripsi ini merupakan langkah awal dalam perjalanan panjang untuk mencapai tujuan akademik dan mengembangkan pengetahuan lebih lanjut dalam bidang yang diteliti.

Penulis memahami bahwa tanpa bimbingan, saran, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, tidak akan dapat melaksanakan penelitian ini dengan baik. Sehubungan dengan itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Herlan, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dr. H. Mukhlis M.Si selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan, saran dan motivasi dalam penulisan Skripsi ini.
3. Bima Sujendra S.IP., M.Si., selaku Koordinator Proram Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Tanjungpura

Pontianak dan selaku Dosen pembimbing pendamping yang telah memberikan bimbingan, saran dan motivasi dalam penulisan Skripsi ini.

4. Prof. Dr. H. Martoyo., M.A, selaku Dosen Penguji Utama dan Martinus., S.Sos., M.Si selaku Dosen Penguji Pendamping atas bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berharga selama proses penyusunan skripsi ini. Bimbingan yang diberikan telah membantu penulis dalam memperbaiki kualitas skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
5. Dr. Ira Patriani, S.IP, M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
6. Dr. Yulius Yohanes, M,Si selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) selama penulis menjalani perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
7. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Administrasi, Staf Jurusan Ilmu Administrasi, Staf Akademik PPAPK Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura yang sudah memberikan arahan dan suport selama dalam proses belajar.
8. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura yang telah banyak berkontribusi dalam pembentukan karakter dan memberikan ilmu – ilmu yang bermanfaat selama proses perkuliahan.
9. Bapak/Ibu Staf Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura yang telah membantu penulis dalam pembuatan surat bebas pinjam sebagai salah satu persyaratan pendaftaran sidang skripsi, serta memberikan pelayanan yang baik selama penulis melakukan kegiatan membaca buku dan skripsi.

10. Bapak/Ibu Staf Akademik Pengelola Program PPAPK Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura yang telah membantu penulis dalam proses pendaftaran outline, seminar proposal, dan sidang skripsi.
11. Bapak/Ibu Ketua dan Staf Koordinator Tata Usaha yang telah membantu penulis dalam memberikan nomor surat SK Pembimbing dan SK Penguji.
12. Bapak/Ibu Ketua dan Staf Keuangan & Kepegawaian serta Subkoordinator Akademik dan Kemahasiswaan yang telah membantu penulis dalam pembuatan transkrip nilai, memvalidasi sertifikat TOEFL sebagai persyaratan pengajuan berkas seminar proposal dan sidang skripsi, serta membantu proses penginputan nilai mata kuliah.
13. Bapak/Ibu Subkoordinator Bidang Umum & BMN yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi dan kebutuhan sarana prasarana selama penyusunan skripsi.
14. Kepala Desa dan Sekretaris Desa Betenung yang telah memberikan izin serta kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian, serta membantu menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan. Dukungan, arahan, dan keterbukaan yang diberikan sangat membantu kelancaran proses penelitian sehingga dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
15. Tokoh Masyarakat Desa Betenung yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan informasi, pandangan, serta pengalaman yang berkaitan dengan kondisi sosial dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di desa.

Informasi yang diberikan sangat membantu penulis dalam memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai objek penelitian.

16. Masyarakat Desa Betenung yang telah berpartisipasi sebagai informan dalam penelitian ini. Kesediaan masyarakat dalam memberikan data, tanggapan, serta pengalaman yang mereka rasakan sangat membantu penulis dalam melengkapi data penelitian sehingga hasil penelitian dapat disusun secara lebih komprehensif dan sesuai dengan kondisi di lapangan.

Semoga segala kebaikan, bantuan dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa, dan hasil karya yang penulis lakukan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran serta manfaat yang cukup bagi kita semua yang memerlukannya. Aamin.

Pontianak, 30 April 2026

Daniel Trimedia Bima Sakti
NIM. E1032201064

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PERSETUJUAN ..... **i**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **ii**
KATA PENGANTAR ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **iv**
DATFTAR TABEL ..... **vi**
DAFTAR GAMBAR ..... **vii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1. Latar Belakang Penelitian 1
1.2. Identifikasi Masalah Penelitian 15
1.3. Fokus Penelitian 15
1.4. Rumusan Masalah 15
1.5. Tujuan Penelitian 16
1.6. Manfaat Penelitian 16
1.6.1. Manfaat Teoritis 16
1.6.2. Manfaat Praktis 17

BAB II TINJUAN PUSTAKA **18**
2.1. Definisi Konsep 18
2.1.1. Fungsi Pemerintah Desa 18
2.1.2. Pemerintah Desa 21
2.1.3. Pemberdayaan Masyarakat 24
2.2. Landasan Teori 27
2.2.1. Teori Pemberdayaan 27
2.3. Hasil Penelitian Yang Relevan 30
2.4. Alur Pikir Pikir Penelitian 35
2.5. Pertanyan Penelitian 38

BAB III METODE PENELITIAN 39
3.1. Jenis Penelitian.....39
3.2. Langkah-Langkah Penelitian 40
3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian.....41
3.3.1. Lokasi Penelitian.....41
3.3.2. Waktu Penelitian 42
3.4. Subjek dan Objek Penelitian 43
3.4.1. Subjek Penelitian.....43
3.4.2. Objek Penelitian 44
3.5. Teknik Pengumpulan Data 45
3.5.1. Observasi.....45
3.5.2. Wawancara 45
3.5.3. Dokumentasi 46
3.6. Alat atau Instrument Pengumpulan Data 46
3.6.1. Pendoman Observasi.....47
3.6.2. Pendoman Wawancara 47
3.6.3. Alat Dokumentasi.....47
3.7. Analisis Data 48
3.7.1. Keabsahan Data.....48
3.7.2. Teknik Analisis Data 49

BAB IV GAMBARAN DESA BETENUNG 51
4.1. Profil Desa Betenung 51
4.2. Kondisi Geografis Desa Betenung.....53
4.2.1. Kondisi Iklim Desa Betenung 53
4.2.2. Topografi Desa Betenung.....57
4.3. Kondisi Demografis Desa Betenung.....58
4.3.1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Desa Betenung 58
4.3.2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Desa Betenung...59
4.3.3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Desa Betenung 61

4.3.4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Desa Betenung 62
4.4. Kondisi Sosial Ekonomi Desa Betenung 63
4.5. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Betenung 65
4.6. Visi dan Misi Pemerintahan Desa Betenung 65
4.6.1. Visi Pemerintahan Desa Betenung 66
4.6.2. Misi Pemerintahan Desa Betenung 67
4.7. Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Desa 68
4.7.1. Tugas Pokok Pemerintah Desa 68
4.7.2. Fungsi Pemerintah Desa 69
4.7.3. Penguatan Peran Pemerintah Desa 72

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 73
5.1. Deskripsi Hasil Penelitian 73
5.1.1. *Enabling* 80
5.1.2. *Emprowing* 89
5.1.3. *Protecting* 99

BAB VI PENUTUP 108
6.1. Kesimpulan 108
6.2. Saran 110
6.3. Keterbatasan Penelitian 112

DAFTAR PUSTAKA 114

LAMPIRAN-LAMPIRAN 117

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1.1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Desa Betenung 2025 5

1.2. Jumlah Penduduk Jenis Pekerjaan Desa Betenung 2025 6

1.3. MusrembangDes Desa Betenung Tahun 2025 9

1.4. APBDes Desa Betenung Tahun 2025.....10

3.1. Waktu Penelitian 43

4.1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Desa Betenung 2025 58

4.2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Desa Betenung 2025.....60

4.3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Desa Betenung 2025.....61

4.4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Desa Betenung 2025.....62

4.5. Jumlah Penduduk Jenis Pekerjaan Desa Betenung 2025 64

5.1. Daftar Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa Betenung Anggaran 2026 93

5.2. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pembinaan PKK dan Kepemudaan/Olah raga Desa Betenung Tahun Anggaran 2026 97

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

2.1. Bagan Alur Pikir Penelitian.....37

4.1. Peta Administrasi Desa Betenung 52

4.2. Kondisi Iklim dan Cuaca Desa Betenung 2025 53

4.3. Kondisi Suhu Desa Betenung 2025.....54

4.4. Kondisi Awan Desa Betenung 2025.....55

4.5. Kondisi Presipitasi Harian Desa Betenung 2025 55

4.6. Kondisi Curah Hujan Desa Betenung 2025 56

4.7. Kondisi Angin Hujan Desa Betenung 2025 57

4.8. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Betenung 65

4.9. Kantor Desa Betenung 66

5.1. MusrembangDes Desa Betenung Tahun 2025 84

5.2. Berita Acara MusrembangDes Desa Betenung Tahun 2025 86

5.3. Rencana Kerja BUMDes Desa Betenung Tahun Anggaran 2025 94

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu serta berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul serta tradisi yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Desa memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional, karena desa merupakan fondasi utama yang menopang struktur sosial, ekonomi, dan budaya di Indonesia. Melalui pembangunan desa yang berkelanjutan, kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat meningkat dan kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan dapat diminimalkan (Suryadi, 2020).

Seiring dengan perkembangan regulasi terkait desa, pemerintah desa memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2025, tugas pemerintah desa mencakup perumusan kebijakan, pelaksanaan administrasi pemerintahan, pengelolaan pelayanan publik, hingga pemberdayaan masyarakat. Peraturan ini menekankan desa sebagai unit pemerintahan terdepan yang bertanggung jawab tidak hanya terhadap pelaksanaan program pemerintah, tetapi juga terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakatnya, sehingga peran desa menjadi semakin krusial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa memperkuat kedudukan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. UU ini menegaskan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa, termasuk pengelolaan Dana Desa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Selain itu, regulasi ini memperjelas peran pemerintah desa dalam mendorong partisipasi masyarakat, pengembangan kapasitas, serta pelayanan publik yang responsif. Dengan adanya penguatan kelembagaan desa, pemerintah desa diharapkan dapat lebih efektif dalam merencanakan, melaksanakan, hingga mengevaluasi program pemberdayaan masyarakat, sehingga tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan dapat tercapai.

Dalam konteks pembangunan masyarakat, pemerintah desa memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan program pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Pemerintah desa dituntut untuk mampu berperan sebagai penggerak utama dalam mengoptimalkan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dimiliki desa. Keberhasilan pembangunan desa sangat bergantung pada sejauh mana pemerintah desa mampu menggerakkan partisipasi masyarakat dalam seluruh proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Dengan demikian, pemerintah desa tidak hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai fasilitator, motivator, dan penggerak perubahan sosial di tingkat akar rumput (Saufiah et al., 2024).

Pemberdayaan masyarakat menjadi bagian penting dari pembangunan desa yang berkelanjutan. Pemberdayaan bukan sekadar memberikan bantuan, tetapi membantu masyarakat agar lebih mampu mengenali masalah, memanfaatkan potensi yang ada, dan mengambil keputusan sendiri untuk memperbaiki kehidupan mereka. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat desa bertujuan meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat melalui pengetahuan, keterampilan, sikap, perilaku, serta pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan lokal.

Dalam proses pemberdayaan tersebut, fungsi pemerintah desa menjadi sangat penting. Fungsi pemerintah desa mencakup merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi program pembangunan yang membantu masyarakat meningkatkan kemampuan, misalnya melalui pelatihan keterampilan, akses modal usaha, dan pengembangan ekonomi lokal. Selain itu, pemerintah desa menjalankan fungsi mendorong masyarakat untuk ikut aktif dalam pengambilan keputusan, pengelolaan sumber daya desa, dan kegiatan gotong royong, sehingga masyarakat merasa memiliki dan bisa lebih mandiri. Pemerintah desa juga menjalankan fungsi penyediaan informasi, fasilitasi layanan publik, dan perlindungan bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan, agar program pemberdayaan berjalan adil dan berkelanjutan.

Sebagai ujung tombak pemerintahan di tingkat paling bawah, fungsi pemerintah desa meliputi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan menjalankan fungsi-fungsi tersebut, pemerintah desa tidak hanya melaksanakan

tugas administratif, tetapi juga menjadi penggerak perubahan sosial dan ekonomi yang membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan. Dalam pelaksanaan program pemberdayaan, pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk:

1. Menyusun perencanaan pembangunan desa yang partisipatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
2. Melaksanakan program peningkatan kapasitas masyarakat seperti pelatihan, pendidikan, dan pendampingan;
3. Mendorong terbentuknya kelembagaan sosial ekonomi desa seperti kelompok tani, koperasi, dan BUMDes; serta
4. Menjamin adanya akses dan kesempatan yang merata bagi seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa.

Fungsi pemerintah desa sebagai fasilitator, motivator, dan penggerak sangat penting dalam pemberdayaan masyarakat. Fungsi sebagai fasilitator meliputi penyediaan sarana, prasarana, dan dukungan teknis yang dibutuhkan masyarakat untuk mengembangkan potensi lokal. Fungsi sebagai motivator mencakup pemberian semangat, dorongan moral, dan penguatan kepercayaan diri masyarakat agar mampu berinisiatif dan berinovasi. Sedangkan fungsi sebagai penggerak meliputi pengorganisasian, koordinasi, dan kepemimpinan dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan yang berbasis kebutuhan masyarakat dan berorientasi pada hasil nyata.

Sejalan dengan fungsi-fungsi tersebut, berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah desa bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ini meliputi pelatihan keterampilan kerja, pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pembentukan kelompok tani dan kelompok perempuan, serta pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan desa, jembatan, air bersih, fasilitas kesehatan, dan

pendidikan. Selain itu, pemerintah desa juga menjalankan fungsi menciptakan lapangan kerja melalui BUMDes serta mendorong inovasi berbasis potensi lokal, seperti pengolahan hasil pertanian dan kerajinan masyarakat. Melalui pelaksanaan fungsi-fungsi ini secara terpadu, pemerintah desa berupaya membangun masyarakat yang mandiri, berdaya saing, dan mampu meningkatkan taraf hidupnya secara berkelanjutan.

Desa Betenung yang terletak di Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang, merupakan salah satu desa dengan karakteristik pedesaan yang khas. Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di sektor pertanian, perkebunan, serta usaha kecil yang menjadi sumber utama penghidupan masyarakat. Dari segi sosial ekonomi, masyarakat Desa Betenung umumnya berada pada tingkat pendidikan menengah, sehingga masih diperlukan peningkatan kapasitas dan keterampilan agar mampu mengembangkan potensi lokal secara optimal (https://betenung.digitaldesa.id/). Beriku tabel jumlah penduduk Desa Betenung :

Tabel 1.1.

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Desa Betenung 2025

No	Jenis Kelamin	Total (Jiwa)
1	Laki-laki	589
2	Perempuan	581
Grand Total		**1.171**

Sumber: Kantor Desa Betenung, 2026

. Berdasarkan Tabel 1.1, jumlah penduduk Desa Betenung pada tahun 2025 menurut jenis kelamin tercatat 589 jiwa laki-laki dan 581 jiwa perempuan, sehingga total penduduk mencapai 1.171 jiwa. Selain itu, distribusi penduduk berdasarkan jenis kelamin juga dapat dijadikan dasar untuk menganalisis kondisi ekonomi masyarakat, khususnya dalam mengidentifikasi kelompok yang rentan terhadap

kemiskinan. Perbedaan jenis pekerjaan, baik di sektor pertanian, perdagangan, maupun pekerjaan informal, memengaruhi pendapatan dan kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan memahami jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin serta jenis pekerjaan yang digeluti, pemerintah desa dapat lebih mudah merencanakan program pemberdayaan, menargetkan bantuan sosial, dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 1.2.

Jumlah Penduduk Jenis Pekerjaan Desa Betenung 2025

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Jiwa)
1	Pelajar/Mahasiswa	300
2	Mengurus Rumah Tangga	304
3	Petani/Pekebun	189
4	Karyawan Swasta	181
5	Belum/Tidak Bekerja	131
6	Wiraswasta	44
7	Guru	22
Grand Total		**1.171**

Sumber: Kantor Desa Betenung, 2026

Berdasarkan Tabel 1.2, jumlah penduduk Desa Betenung tahun 2025 menurut jenis pekerjaan menunjukkan struktur sosial ekonomi yang beragam. Kelompok terbesar adalah penduduk yang mengurus rumah tangga sebanyak 304 jiwa, disusul pelajar dan mahasiswa berjumlah 300 jiwa, sementara penduduk yang bekerja sebagai petani atau pekebun tercatat 189 jiwa. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat berada pada sektor informal atau belum memasuki pasar kerja produktif, yang rentan terhadap keterbatasan pendapatan dan risiko kemiskinan.

Meskipun memiliki berbagai keterbatasan, Desa Betenung sesungguhnya menyimpan potensi sumber daya alam yang cukup besar, terutama di sektor pertanian dan perkebunan yang dapat dikembangkan menjadi peluang ekonomi produktif. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal karena masih adanya hambatan seperti keterbatasan akses terhadap informasi, kurangnya modal usaha, serta rendahnya kemampuan masyarakat dalam berinovasi dan mengelola sumber daya yang ada.

Berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2024, Desa Betenung memperoleh skor sebesar 0.8267 dengan status Desa Mandiri. Capaian ini menunjukkan bahwa Desa Betenung telah mengalami perkembangan yang cukup pesat dalam aspek ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Walaupun demikian, pencapaian sebagai Desa Mandiri tersebut masih membutuhkan penguatan berkelanjutan, terutama pada sektor pemberdayaan masyarakat, agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat desa. Dengan demikian, status yang telah diraih ini menjadi dasar penting untuk mendorong peningkatan kapasitas masyarakat secara lebih terarah.

Pada aspek Ketahanan Sosial (IKS 0.8800), Desa Betenung memiliki fasilitas publik yang cukup memadai seperti Poskesdes, Posyandu aktif, serta akses pendidikan yang relatif baik. Pada aspek Ketahanan Ekonomi (IKE 0.7333), sudah tersedia fasilitas ekonomi seperti pasar, koperasi, dan BUMDes, meskipun masih terdapat hambatan dalam akses perbankan dan distribusi logistik. Adapun pada aspek Ketahanan Lingkungan (IKL 0.8667), kondisi alam desa tetap terjaga dan kegiatan mitigasi bencana berjalan dengan baik (https://betenung.digitaldesa.id/).

Namun, di balik capaian tersebut, kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas dan potensi yang ada masih perlu ditingkatkan melalui pemberdayaan yang sistematis dan berkelanjutan.

Meskipun Desa Betenung telah mencapai status Desa Mandiri berdasarkan IDM 2024, alokasi anggaran untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat masih terbilang minim. Berdasarkan dokumen APBDes dan RKPDes, anggaran yang dialokasikan untuk program pemberdayaan hanya berkisar 8–12% dari total anggaran desa. Sebagian besar dana desa tetap diarahkan pada pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, sarana air bersih, dan fasilitas publik lainnya. Fokus yang lebih besar pada pembangunan fisik ini menyebabkan ruang fiskal untuk program peningkatan kapasitas masyarakat menjadi terbatas sehingga belum mampu mendukung pengembangan potensi lokal secara optimal.

Minimimnya anggaran tersebut berpengaruh langsung pada rendahnya jumlah kegiatan pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, serta program peningkatan kapasasan masyarakat. Pelaku UMKM, kelompok tani, dan kelompok perempuan sangat jarang mendapatkan pelatihan berkelanjutan mengenai kewirausahaan, pengembangan usaha berbasis potensi lokal, maupun pemanfaatan teknologi digital dalam pemasaran produk. Kondisi ini menghambat perkembangan inovasi di desa, sehingga berbagai potensi di sektor pertanian dan perkebunan belum dapat dikelola secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Berikut tabel MusrembangDes Desa Betenung Tahun 2025 :

Tabel 1.3.

MusrembangDes Desa Betenung Tahun 2025

Keterangan	Data / Status
Jumlah musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa/Kelurahan	1 kali
Kehadiran masyarakat dalam setiap musyawarah	65 %
Peserta laki-laki dalam Musrenbang	70 %
Peserta perempuan dalam Musrenbang	30 %
Musyawarah antar desa yang dikoordinasikan Kecamatan	-
Penggunaan profil Desa/Kelurahan sebagai data dasar	Ya
Penggunaan data BPS dan data sektoral dalam perencanaan partisipatif	Ya
Pelibatan masyarakat dalam pemutakhiran data profil desa	Ya
Usulan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan	70 %
Usulan Pemerintah Desa/Kelurahan yang disetujui dan dimuat dalam RAPB-Desa	75 %
Usulan rencana kerja program dari pemerintah kab./prov./pusat yang disetujui masyarakat	65 %
Usulan rencana kerja pemerintah tingkat atas yang ditolak	-
Kepemilikan dokumen RKPD/K	Ada
Kepemilikan dokumen RPJM/K	Ada
Dokumen hasil Musrenbang desa/kelurahan yang diusulkan ke pemerintah tingkat atas	Ada
Kegiatan masyarakat yang tidak direalisasikan dalam APB-Desa/Daerah	1 kegiatan
Kegiatan masyarakat yang pelaksanaannya tidak sesuai hasil Musrenbang	-

Sumber: Kantor Desa Betenung, 2026

Berdasarkan Tabel 1.3, pelaksanaan Musrenbang Desa Betenung tahun 2025 menunjukkan adanya partisipasi masyarakat yang cukup signifikan dalam perencanaan pembangunan. Desa mengadakan satu kali musyawarah dengan kehadiran masyarakat mencapai 65%, terdiri dari 70% laki-laki dan 30% perempuan. Data desa, termasuk profil, BPS, dan data sektoral, digunakan sebagai dasar perencanaan partisipatif, dan masyarakat dilibatkan dalam pemutakhiran data. Usulan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan

mencapai 70%, sedangkan usulan pemerintah desa yang dimuat dalam RAPB-Desa sebesar 75%. Dokumen perencanaan seperti RKPD, RPJM, dan hasil Musrenbang tersedia, meskipun satu kegiatan masyarakat tidak terealisasi sesuai APB-Desa.

Kondisi ini sejalan dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dan pelestarian hasil pembangunan, yang tergolong aktif, terutama dalam proyek fisik sesuai hasil Musrenbang, dengan keterlibatan mencapai 80% dan partisipasi dalam proyek padat karya sebesar 95%. Masyarakat melaksanakan enam kegiatan sesuai ketentuan APB-Desa dan menginisiasi 12 jenis kegiatan pelestarian hasil pembangunan, didukung 59 kegiatan dari APB-Desa dan swadaya masyarakat, serta beberapa kegiatan dari APB Kabupaten/Kota dan Provinsi. Meskipun demikian, keterlibatan masyarakat dalam usulan program dari pemerintah desa dan tingkat atas masih terbatas, menekankan perlunya koordinasi dan pemberdayaan yang lebih efektif agar partisipasi lebih merata dan hasil pembangunan dapat terjaga secara berkelanjutan. Berikut tabel APBDes Desa Betenung Tahun 2025 :

Tabel 1.4.

APBDes Desa Betenung Tahun 2025

Keterangan	Nominal
Jumlah anggaran belanja dan penerimaan tahun ini	Rp 2.847.503.822,63
Sumber Anggaran	
APBD Kabupaten/Kota	Rp 208.942.000,00
Bantuan Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp 0,00
Bantuan Pemerintah Provinsi	Rp 625.000.000,00
Bantuan Pemerintah Pusat	Rp 810.240.000,00
Pendapatan Asli Desa	Rp 67.843.822,63
Swadaya Masyarakat Desa/Kelurahan	Rp 0,00
Alokasi Dana Desa	Rp 1.091.478.000,00
Sumber Pendapatan dari Perusahaan di desa/kelurahan	Rp 0,00
Sumber Pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat	Rp 44.000.000,00
Jumlah Belanja Publik/Belanja Pembangunan	Rp 1.855.082.718,01
Jumlah Belanja Aparatur/Pegawai	Rp 992.421.104,62

Sumber: Kantor Desa Betenung, 2026

Berdasarkan Tabel 1.4, APBDes Desa Betenung tahun 2025 memiliki total anggaran belanja dan penerimaan sebesar Rp 2.847.503.822,63, dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Kabupaten/Kota, Bantuan Pemerintah Provinsi dan Pusat, Pendapatan Asli Desa, Alokasi Dana Desa, serta sumber lain yang sah, sementara Bantuan Pemerintah Kabupaten/Kota, Swadaya Masyarakat, dan pendapatan perusahaan desa tidak tercatat. Belanja desa terbagi menjadi belanja publik atau pembangunan sebesar Rp 1.855.082.718,01 dan belanja aparatur/pegawai Rp 992.421.104,62, menunjukkan prioritas penggunaan anggaran untuk pembangunan fisik serta operasional aparatur desa.

Meskipun Dana Desa telah dialokasikan, fungsi pemerintah desa sebagai fasilitator dan motivator dalam pemberdayaan masyarakat masih terbatas. Hal ini terlihat dari akses masyarakat terhadap informasi, teknologi, dan peluang usaha yang belum memadai. Koordinasi dengan lembaga pendukung seperti BUMDes, kelompok tani, PKK, dan Karang Taruna juga belum optimal, sehingga program pemberdayaan masyarakat tidak terintegrasi dengan perencanaan jangka panjang dan banyak kegiatan menjadi tidak berkelanjutan. Kondisi ini berdampak pada partisipasi masyarakat yang belum merata, beberapa program masih bersifat top-down, dan keberlanjutan kegiatan belum terjamin karena minimnya evaluasi dan tindak lanjut.

Seiring dengan hal tersebut, observasi di lapangan menunjukkan beberapa kendala nyata yang menghambat program pemberdayaan masyarakat agar berjalan efektif. Rendahnya literasi digital membuat petani kesulitan memasarkan hasil pertanian, seperti sayur, buah, atau padi, karena belum terbiasa menggunakan

aplikasi *online* atau media sosial. Pelaku UMKM, seperti pengrajin kerajinan tangan, juga belum mampu memanfaatkan teknologi untuk mempromosikan produknya, sehingga jangkauan pasar mereka terbatas. Selain itu, keterlibatan generasi muda dalam program pemberdayaan masih rendah karena sebagian besar kegiatan lebih banyak diikuti oleh orang dewasa, sementara program yang menampung ide, kreativitas, dan potensi remaja sangat sedikit.

Di sisi lain, BUMDes sebagai penggerak ekonomi desa belum berfungsi secara optimal. Beberapa BUMDes hanya menjalankan simpan pinjam atau toko desa tanpa adanya inovasi usaha baru maupun promosi produk lokal ke pasar yang lebih luas. Kapasitas aparatur desa yang terbatas juga menjadi hambatan, sehingga perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat belum berbasis data yang akurat, dan beberapa bantuan tidak tepat sasaran. Dana Desa yang sebagian besar diarahkan untuk pembangunan fisik, seperti jalan, jembatan, atau fasilitas umum, membuat aspek pemberdayaan masyarakat kurang diperhatikan. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas aparatur desa dan pengelolaan program pemberdayaan yang lebih strategis, agar seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaatnya, meningkatkan pendapatan, dan mendorong kemandirian desa secara berkelanjutan.

Penelitian Ira Patriani dan Ahirul Habib Padilah (2025) menyoroti peran Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa Nanga Sayan, Kecamatan Sayan, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Penduduk desa mayoritas bekerja sebagai petani karet, berladang liar, dan bersawah dengan tingkat pendidikan rendah. Pemerintah Desa memberdayakan masyarakat melalui APBDes, seperti

pertanian terintegrasi, bantuan bibit ikan, penyuluhan, dan pemberdayaan ternak ayam, namun terbatas oleh kurangnya tenaga penyuluh dan fasilitas pendukung.

Penelitian Suryadi (2025) meneliti peran Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Teluk Nilap, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir. Hasil penelitian menunjukkan peran pemerintah desa belum maksimal, dipengaruhi kondisi penduduk, partisipasi masyarakat, serta keterbatasan peralatan dan fasilitas, sehingga program pemberdayaan belum sepenuhnya terealisasi.

Penelitian oleh Saefuloh, Dahly Sukmapryandhika, dan Titin Rohyati (2025) menyoroti peranan Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat adat di Kampung Cikondang, Desa Lamajang, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Masalah yang muncul meliputi keluarga kurang sejahtera, pengelolaan wisata kebudayaan yang belum berkembang, keterbatasan keterbukaan kebijakan, anggaran, fasilitas, serta jarangnya pelatihan. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Pemerintah Desa sebagai Regulator, Dinamisator, dan Fasilitator. Hasil menunjukkan Pemerintah Desa cukup optimal sebagai Regulator dan Dinamisator, namun kurang maksimal dalam mempercepat perubahan desa, pelatihan teknis, dan pendampingan masyarakat adat.

Beberapa penelitian sebelumnya menyoroti peran Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat, meskipun dengan konteks dan tantangan yang berbeda. Penelitian Ira Patriani dan Ahirul Habib Padilah (2025) di Desa Nanga Sayan menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui APBDes berjalan terbatas oleh rendahnya tenaga penyuluh dan fasilitas pendukung. Suryadi (2025)

menemukan peran pemerintah desa di Desa Teluk Nilap belum maksimal karena kondisi penduduk, partisipasi masyarakat, serta keterbatasan peralatan dan fasilitas. Sedangkan Saefuloh, Dahly Sukmapryandhika, dan Titin Rohyati (2025) menyoroti Desa Lamajang, di mana pemerintah desa cukup optimal sebagai Regulator dan Dinamisator, tetapi kurang maksimal dalam pelatihan teknis dan pendampingan masyarakat adat.

Penelitian ini di Desa Betenung, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang bertujuan mendeskripsikan peran Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat. Mengacu pada teori peran Rosmaladewi (2018, dalam Saefuloh et al., 2025), terdapat tiga peran penting: 1) Regulator, menetapkan peraturan dan kebijakan pemberdayaan masyarakat; 2) Dinamisator, mendorong perubahan positif dan pengembangan potensi masyarakat; 3) Fasilitator, menyediakan sarana, prasarana, dan pendampingan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Desa Betenung. Dengan demikian, penelitian ini ingin melihat sejauh mana peran tersebut dapat diimplementasikan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Desa Betenung.

Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan bahwa meskipun capaian pembangunan Desa Betenung tergolong baik, masih terdapat kesenjangan antara harapan dan realitas. Pemerintah desa memerlukan strategi baru yang lebih efektif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam menggerakkan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengambil penelitian berjudul “Fungsi Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Betenung, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang”.

1.2. Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka penulis menentukan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Partisipasi masyarakat Desa Betenung dalam program pemberdayaan masih rendah.
2. Minimnya anggaran terkait pemberdayaan masyarakat Desa Betenung.
3. Minimnya peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa Betenung.

1.3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini diperlukan agar penulis dapat terarah dan tidak menyimpang dari prosedur penelitian, baik dalam mengumpulkan data maupun menganalisis data. Untuk memfokuskan ruang lingkup permasalahannya, maka dalam penelitian ini penulis memusatkan masalah tersebut pada "Fungsi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat yang terdiri dari aspek *Enabling, Empowering* dan *Protecting* Di Desa Betenung Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang".

1.4. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah pernyataan yang menjelaskan fokus permasalahan dalam penelitian, disusun secara jelas dan spesifik untuk memandu arah penelitian serta pencapaian tujuan penelitian. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah " Bagaimana Fungsi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Betenung Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang".

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah pernyataan yang menjelaskan apa yang ingin dicapai penulis melalui studi yang dilakukan, baik untuk menjawab pertanyaan penelitian maupun memecahkan masalah yang diteliti. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat dari aspek Fungsi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat yang terdiri dari aspek *Enabling, Empowering* dan *Protecting* Di Desa Betenung Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang di Desa Betenung, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang.

1.6. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah kontribusi yang diberikan oleh hasil penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, pemecahan masalah praktis, serta memberikan solusi atau informasi yang berguna bagi pihak terkait. Manfaat dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu :

1.6.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pemerintahan, terutama dalam memperdalam pemahaman mengenai peran pemerintah desa dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Kajian ini memberikan kontribusi terhadap penguatan teori tentang tata kelola pemerintahan desa, efektivitas kebijakan publik di tingkat lokal, serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Selain itu, penelitian ini juga memperkaya literatur akademik terkait implementasi fungsi pemerintahan desa dalam mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

1.6.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah Desa Betenung

   Penelitian ini bisa menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah Desa Betenung untuk meningkatkan fungsi pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat. Hasil penelitian diharapkan membantu pemerintah desa memperbaiki strategi, memperkuat kerja sama antarperangkat, dan memanfaatkan sumber daya lokal dengan lebih baik agar program pemberdayaan berjalan efektif dan manfaatnya dirasakan masyarakat.

2. Bagi Masyarakat Desa Betenung

   Penelitian ini diharapkan membantu masyarakat memahami pentingnya fungsi pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat. Dengan terlaksananya fungsi fasilitasi, motivasi, dan penggerakan, masyarakat bisa lebih aktif ikut dalam kegiatan pemberdayaan, meningkatkan kemampuan diri, kemandirian ekonomi, dan kesadaran bersama dalam memanfaatkan potensi desa.

3. Bagi Peneliti Lainnya

   Penelitian ini juga bisa menjadi referensi bagi penulis lain yang ingin mempelajari pemberdayaan masyarakat di desa. Temuan penelitian dapat membantu memahami bagaimana fungsi pemerintah desa bekerja dalam mengelola program, bekerja sama dengan lembaga desa, dan memanfaatkan potensi masyarakat, sehingga bisa menjadi dasar penelitian selanjutnya.